



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
UNIT KERJA : WAKIL PIMPINAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAHMUD ABDULLAH
2. Jabatan : WAKIL BUPATI
3. NHK : 63782

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.760.649.000

1. Tanah Seluas 2470 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, WARISAN Rp. 24.000.000
2. Tanah Seluas 19900 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 29.850.000
3. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
4. Tanah Seluas 19975 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 29.965.500
5. Tanah Seluas 19119 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 28.678.500
6. Tanah Seluas 18770 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 28.155.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 304 m2/130 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
8. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/200 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/150 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 17.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000



2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR ` Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.875.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	137.233.317
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.941.757.317
III. HUTANG	Rp.	118.000.393
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.823.756.924

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.